

**PANCASILA DAN BERBAGAI PERMASALAHAN AKTUAL  
BANGSA INDONESIA**

**Balqist Salsabila Mukaromah, Kholid Junaidi, Dwi Natasya,**

**Nurul Aulia, Vania Azalia**

Program Studi Pendidikan Geografi

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

[balqisssalsabilaa094@gmail.com](mailto:balqisssalsabilaa094@gmail.com) [kholedjunedy@gmail.com](mailto:kholedjunedy@gmail.com) [dwinatasya47@gmail.com](mailto:dwinatasya47@gmail.com)

[21.nurulaulia@gmail.com](mailto:21.nurulaulia@gmail.com) [vaniaazalia0606@gmail.com](mailto:vaniaazalia0606@gmail.com)

**Abstrak**

Pancasila adalah pandangan yang hidup berketuhanan Maha Esa ialah menyembah-NYA. Pancasila menjunjung tinggi kemanusiaan, kesejahteraan, keadilan, persatuan, kesatuan dan keselarasan. Pancasila bersifat akomodatif dan menggunakan system pemerintahan demokrasi berdasarkan kebijaksanaan musyawara dan mufakat. Diamalkan melalui pembangunan nasional dalam empat bidang politik, ekonomi, sosial, dan dalam isu pendidikan.

Kata Kunci : Pancasila, Permasalahan, Aktual

**PENDAHULUAN**

Pancasila menjunjung tinggi kemanusiaan, kesejahteraan, keadilan, persatuan, kesatuan, dan keselarasan. Pancasila bersifat akomodatif dan menggunakan sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan kebijaksanaan musyawarah dan mufakat. Diamalkan melalui pembangunan nasional dalam empat bidang politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan. Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlandung di balik legitimasi ideologi Negara Pancasila dengan kata lain Pancasila tidak lagi dijadikan pandangan hidup bangsa, sehingga banyak muncul permasalahan aktual bangsa yang terjadi saat ini. Permasalahan aktual dapat mencakup berbagai isu, seperti pendidikan, ekonomi, sosial maupun politik. Nilai nilai yang

terkandung dalam pancasila, seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, menjadi landasan penting untuk menyelesaikan isu-isu tersebut

## **METODE PENELITIAN**

Menggunakan metode library riset, metode library riset merupakan pendekatan dan teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi yang terdapat di dalam internet, seperti buku elektronik, jurnal ilmiah, pemanfaatan layanan referensi yang berkaitan dengan topik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pancasila Dan Permasalahan Aktual Bangsa Dalam Bidang Politik**

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki lima sila yang menjadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa. Namun, dalam praktiknya, berbagai masalah politik terkini sering kali menguji nilai-nilai Pancasila. Salah satu permasalahan dalam bidang politik ini adalah kasus korupsi yang banyak sekali terjadi di Indonesia. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi adalah perbuatan di mana seseorang secara diam-diam mengambil uang negara untuk keuntungan pribadi atau keuntungan lain yang bukan urusan negara. Di Indonesia kasus korupsi ini sudah sangat banyak terjadi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah kepercayaan pejabat yang lemah. Pejabat seharusnya harus bisa memiliki keyakinan yang kuat agar tidak tergiur dengan sesuatu yang menjerumuskan mereka untuk melakukan korupsi ini. Kasus korupsi ini terus menerus meningkat di Indonesia sampai saat ini. Adanya kasus korupsi ini membuat dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia yaitu meningkatnya kemiskinan yang absolut dan dampak pada ketimpangan yaitu munculnya kemiskinan relatif. Korupsi ini membuat masyarakat bawah semakin menderita. Banyak cara mengatasi masalah korupsi di Indonesia ini, salah satunya yaitu dengan penguatan badan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya sudah dilakukan sejak empat dekade silam. Sejumlah perangkat hukum sebagai instrumental legal yang menjadi dasar proses pemberantasan korupsi di Indonesia juga telah disusun sejak lama. Namun

efektifitas hukum yang belum cukup memadai menyebabkan korupsi di Indonesia tidak kunjung membaik.

Strategi pemberantas korupsi harus dibangun dan didahului oleh adanya itikad kolektif, yaitu semacam kemauan dan kesungguhan (*willingness*) dari semua pihak untuk bersama-sama tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap perilaku korupsi. Oleh karena itu, dalam mewujudkan sebuah strategi yang efektif memberantas korupsi, dibutuhkan pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- Didorong oleh keinginan politik serta komitmen yang kuat dan muncul dari kesadaran sendiri
- Menyeluruh dan seimbang
- Sesuai dengan kebutuhan, ada target, dan berkesinambungan
- Berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia
- Terukur dan transparan dan bebas dari konflik kepentingan

Pembentukan KPK didasarkan oleh undang-undang No.30 tahun 2002 tentang komisi pemberantas korupsi. Sesuai dengan undang-undang tersebut, KPK memiliki tugas melakukan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantas tindak pidana korupsi; penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan pemantauan (*monitoring*) penyelenggaraan pemerintah negara. Dengan demikian, maka KPK ini merupakan ujung tombak pemberantas korupsi di Indonesia.

Segala bentuk penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selayaknya dapat dikembalikan kepada lemahnya pemahaman dan pengalaman masyarakat Indonesia atas Pancasila. Seseorang yang berjiwa Pancasila juga menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3 UUD 1945), maka penting sekali menjunjung tinggi hukum dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebagai makhluk beragama, juga tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk merugikan kepentingan orang lain.

Setiap membela Pancasila adalah membela negara, dimana salah satu wujud bela negara dengan melawan perbuatan korupsi yang merugikan masa depan bangsa. Korupsi sebagai bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan butir nilai dalam Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa menekankan bahwa manusia Indonesia memiliki keimanan dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tindak pidana korupsi ini membuat para koruptor

melupakan bahwa tuhan yang maha Esa itu melihat semua segala perbuatan yang di lakukan hambanya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini menegaskan untuk memiliki rasa keadilan dan keadaban, seorang koruptor tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban, sebab hak yang seharusnya dimiliki rakyat diambil secara sepihak untuk kepentingan pribadi.

Persatuan Indonesia, dengan melakukan korupsi, maka dirinya merusak persatuan nasional karena perbuatan yang dilakukan berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak dapat merasakan kenikmatan dan hasil pembangunan di Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ketika wakil rakyat justru sibuk mengurus anggaran negara, maka pelanggaran terhadap sila keempat sudah terjadi dan mengundang sinisme masyarakat bahwa gedung wakil rakyat tak ubahnya tempat pertemuan koruptor.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ada lagi keadilan ketika kesenjangan semakin lebar di sebabkan anggaran negara tidak lagi pro rakyat. Banyak bangunan yang tidak selesai karena uang yang di tahan di tangan para koruptor sehingga pembangunan tidak sesuai harapan.

Pancasila bukan sebuah aturan yang kaku dan bersifat terbuka. sehingga dapat di kembangkan dalam berbagai dimensi kehidupan dan melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan yang sama menjaga dan mengamalkan nilai pancasila

## **2. Pancasila Dan Permasalahan Aktual Bangsa Dalam Bidang Ekonomi**

Salah satu permasalahan yang terkait dengan permasalahan aktual bangsa dalam bidang ekonomi ini adalah kemiskinan. kemiskinan adalah kondisi seseorang di mana ia tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti standar minimum kebutuhan pokoknya yang diakibatkan karena belum atau tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Kemiskinan ini merupakan permasalahan serius di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kasus kemiskinan di Indonesia, tetapi usaha tersebut belum dapat meredam peningkatan atau kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Tejadinya kasus kemiskinan di Indonesia ini pasti memiliki faktor penyebab. faktor penyebab munculnya kasus kemiskinan di Indonesia yang paling utama yaitu kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM)

dapat di sebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Ini menyebabkan pengaruh dalam dunia usaha dan pekerjaan. Dunia pekerjaan sudah pasti memilih sumber daya manusia yang berkualitas, berkopeten, dan daya saing yang unggul. Seseorang yang tidak kopeten tentunya menjadi pertimbangan yang sangat matang bagi perusahaan dan dunia usaha dalam menerima calon pegawai. Tentunya mereka akan memilih seseorang yang memang benar-benar memiliki kualitas yang unggul yang di nilai mampu mengembangkan usaha yang sedang ia jalankan. Dengan demikian, orang tidak memiliki kopetensi dan kualitas yang unggul maka memiliki kesempatan yang kecil untuk mendapatkan pekerjaan yang memiliki upah yang tinggi. sehingga ini menyebabkan hidupnya itu berkekurangan. Jadi masyarakat di Indonesia ini harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan. karena pendidikan inilah yang membuat sumber daya manusia semakin meningkat. Melalui pendidikan, seseorang akan memperoleh ilmu dan wawasan yang luas sehingga dapat diaplikaikan di berbagai lingkungan kehidupan seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan bahkan bangsa dan negara. Dampak dari kemiskinan ini adala munculnya perbuatan kriminalitas. Kriminalitas adalah suatu bentuk perbuatan atau perilaku seseorang terhadap orang lain yang bersifat mengancam atau membahayakan orang lain. tindakan ini disebabkan karena seseorang tidak memiliki jalan lain untuk memenuhi kebutuhannya. ini membuat dampak buruk bagi masyarakat yaitu memiliki rasa tidak aman. kondisi di ingkungan masyarakat pun menjadi tidak nyaman serta penuh dengan kekhawatiran akan terjadi tindak krminalitas tersebut.

Nilai pancasila kelima ini berkaitan erat dengan kemiskinan. sila kelima mengamati bahwa keadilan harus di rasakan seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya keadilan dalam pendidikan saja tetapi dalam berbagai segi kehidupan. Kemiskinan ini merupakan salah satu indikator tidak tercapainya tujuan bangsa Indonesia yang terdapat dalam sila kelima, yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan sila kelima ini tidak tercapai karena ada suatu ketimpangan terhadap sila kelima, seperti ketimpangan pemerintah kesejahteraan dan distribusi kejayaan. sila kelima pancasila harus benar-benar diterapkan untuk mengatsi kemiskinan di indonesia demi terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera.

### **3. Pancasila Dan Permasalahan Aktual Bangsa Dalam Bidang Sosial**

Salah satu permasalahan aktual bangsa dalam bidang sosial adalah HAM. HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia ini memiliki permasalahan yang kompleks. Ada 3 masalah utama yang harus di cermati dalam membahas masalah HAM, misalnya:

1. HAM merupakan masalah yang sedang hangat di bicarakan, karena topiknya merupakan salah satu diantara tiga masalah yang memperhatikan dunia. Ketiga topik yang memperhatikan itu ialah: HAM, demokratisasi dan pelestarian lingkungan hidup, isu HAM selalu di angkat oleh media massa setiap bulan desember sebagai peringatan di terimanya piagam HAM oleh sidang umum PBB pada 10 Desember 1948 masalah HAM secara khusus kadang di kaitkan dengan hubungan bilateral negara pendonor dengan penerima bantuan.
2. HAM syarat dengan tarik ulur dengan masalah paham universalisme dan partikularisme. Universalisme menganggap HAM itu ukurannya bersifat universal di terapkan di semua penjuru dunia. Partikularisme memandang semua bangsa memiliki resepsi yang khas tentang HAM sesuai dengan historis kulturalnya, sehingga setiap bangsa dibenarkan memiliki ukuran dan kriteria sendiri.
3. Ada tiga tataran diskusi tentang HAM, (1) tataran filosofis, yang melihat HAM sebagai prinsip moral umum yang berlaku universal karena menyangkut ciri kemanusiaan yang paling asasi (2) tataran ideologis, yang melihat HAM dalam kaitannya dengan hak kewarganegaraan, sifatnya partikular, karena terkait dengan bangsa atau negara tertentu, dan (3) tataran kebijakan praktis sifatnya sangat partikular karena memperhatikan situasi dan kondisi yang sifatnya insidental.

Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, prinsip dasarnya meliputi hak untuk hidup (pasal 9 ayat 1, 2, dan memandang semua bangsa memiliki resepsi yang khas tentang HAM sesuai dengan historis kulturalnya, sehingga setiap bangsa dibenarkan memiliki ukuran dan kriteria sendiri.

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermula pada Pancasila. Hubungan antara HAM dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sila ketuhanan yang mahas esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan setiap hak warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapatkan jaminan perlindungan undang-undang.
3. Sila persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi maupun golongan, hal ini hendaknya sesuai dengan prinsip HAM dimana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.
4. Sila kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, tercermin dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat, yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat tanpa adanya paksaan, tekanan, atau intervensi yang membelenggu hak partisipasi masyarakat.
5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan yang sebesar-besarnya masyarakat.

#### **4. Pancasila Dan Permasalahan Aktual Dalam Isu Pendidikan**

Indonesia dengan masyarakat yang beragam baik dari suku, agama, ras, dan budaya berpotensi tinggi terhadap munculnya perbedaan pandangan, pendapat dan cara merepleksi serta mengapresiasi keberagaman tersebut. Hal ini menuntut penyelenggara pendidikan yang mampu menopang dan mendorong insan-insan terdidik untuk menerima realitas tersebut sebagai sebuah anugrah, bukan sebaliknya. Pendidikan adalah kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan memiliki peran penting dalam mencapai visi sebagai bangsa yang maju dan sejahtera. Namun, kenyataannya, masih terdapat banyak kendala dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, seperti tingkat literasi yang rendah, ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah, dan akses yang masih terbatas bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, dan salah satu sumber inspirasi untuk hal ini adalah nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini dapat di jadikan pedoman dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari

persatuan dan ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial dapat menjadi landasan dalam pembangunan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Nilai persatuan dan ketuhanan yang maha esa dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan saling menghargai. Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan bermoral dapat membentuk karakter peserta didik yang baik dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Proses pendidikan yang partisipatif dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan beragam. Partisipasi orang tua, guru, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Selain itu, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab juga dapat membantu menciptakan pendidikan yang lebih manusiawi dan berwawasan kedepan. Pendidikan yang memperhatikan kebutuhan peserta didik secara holistik dapat membantu mereka menjadi manusia yang lebih baik dan memiliki pemahaman yang lebih luas tentang dunia. Secara keseluruhan, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilakukan melalui nilai-nilai Pancasila.

Terakhir, keadilan sosial menjadi nilai Pancasila yang penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata. Upaya untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh masyarakat, termasuk yang berasal dari daerah terpencil atau kurang mampu, dapat membantu meningkatkan akses pendidikan yang lebih baik. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan berdampak positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki lima sila yang di jadikan sebagai pedoman dalam berbagai kehidupan berbangsa. terutama dalam permasalahan permasalahan aktual bangsa yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki masyarakat yang beragam baik suku, agama, ras, dan budaya yang berpotensi dapat memunculkan berbagai perbedaan pandangan, sehingga Pancasila ini di jadikan pedoman bagi permasalahan aktual yang ada di Indonesia, seperti permasalahan aktual dalam bidang politik yaitu korupsi, korupsi adalah perbuatan di mana seseorang secara diam-

diam mengambil uang negara untuk keuntungan pribadi atau keuntungan lain yang bukan urusan negara. Ekonomi yaitu kemiskinan, dimana kemiskinan ini adalah kondisi seseorang di mana ia tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti standar minimum kebutuhan pokoknya yang diakibatkan karena belum atau tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Sosial yaitu HAM, HAM ini adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan.hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia, dan isu pendidikan yang meliputi seperti tingkat literasi yang rendah, ketimpangan kualitas pendidika antar daerah, dan akses yang masih terbatas bagi masyarakat kurang mampu. Dengan adanya Pancasila ini di harapkan dapat berdampak positif terhadap permasalahan permasalahan aktual tersebut sehingga dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ceswara, D. F., & Wiyatno, P. (2018). Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 227-241.
- Dina, A. (2019). Nilai-Nilai Pancasila dalam Menyikapi Korupsi di Indonesia.
- Febriyana, D., Octaviani, N., Anggraeni, T., & Fitriyono, R. A. (2022). Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi yang Terjadi di Indonesia. *Gema Keadilan*, 9(3), 174-185.
- Kurnia, H. (2023). Upaya meningkatkan pendidikan indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 472-478.
- Olfiyani, G. A., & Najicha, F. U. (2022). Aktualisasi Sila Ke-5 Pancasila untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 298-305.
- Susanti Emilia,s.pd.,M.Pd.(2020) Pancasila, Pekanbaru, Cahaya Firdaus, 73-79